

Apri Damai Sagita Krissandi
Universitas Sanata Dharma
Dosen FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Malari 1974: Ketika Kerusuhan Menjadi Alasan Membungkam Pers

Peristiwa Malari 1974 berujung pada pembredelan media. Kini, tekanan terhadap pers berubah bentuk, tetapi kebebasan tetap menjadi persoalan.

4 jam lalu

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel 0



Ilustrasi AI

***

Setelah demonstrasi mahasiswa berubah menjadi kerusuhan pada Januari 1974, pemerintah Orde Baru tidak hanya menangkap para aktivis. Sejumlah surat kabar juga kehilangan izin terbit. Lima dekade kemudian, bentuk tekanan terhadap pers berubah, tetapi persoalan

Tutup Iklan X

berubah menjadi kerusuhan. Kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyuarakan penolakan terhadap dominasi modal asing, praktik korupsi, kenaikan harga, dan pengaruh para asisten pribadi Presiden Soeharto yang dikenal sebagai Aspri. Di balik tuntutan tersebut, tersimpan kegelisahan tentang arah pembangunan yang dinilai lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat luas.

Situasi kemudian memburuk. Pembakaran kendaraan, perusakan pertokoan, dan bentrokan mewarnai sejumlah kawasan Jakarta. Peristiwa yang dikenal sebagai Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari itu berujung pada penangkapan aktivis dan pengetatan kehidupan politik.

Namun, ada satu konsekuensi lain yang tidak kalah penting: pers turut menjadi sasaran.

Di tengah upaya pemerintah memulihkan ketertiban, sejumlah surat kabar kehilangan izin terbit. Media yang sebelumnya memberitakan kritik mahasiswa dan persoalan kebijakan pemerintah mendadak tidak lagi dapat menjalankan kegiatan jurnalistiknya. Peristiwa Malari pun menjadi salah satu titik penting dalam sejarah pembredelan pers pada masa Orde Baru.

Ketika pemberitaan dianggap mengganggu keamanan

Pembredelan tidak terjadi dalam satu keputusan yang berdiri sendiri. Sejumlah media dilarang terbit secara bertahap, mulai sehari setelah kerusuhan hingga hari-hari berikutnya. Dalam catatan mengenai kebijakan pembredelan pers Orde Baru, Harian *Nusantara* termasuk media yang izin terbitnya dicabut pada 16 Januari 1974. Surat kabar *Indonesia Raya* menyusul pada 22 Januari 1974.

Mingguan Wenang, *Pemuda Indonesia*, *Ekspres*, *Pedoman*, *Suluh Berita*, dan *Indonesia Pos*. Daftar ini menunjukkan bahwa dampaknya menjangkau surat kabar harian, majalah berita, hingga penerbitan mahasiswa dan media daerah.

Apa alasan pemerintah membredel media-media tersebut?

Dalam sejumlah keputusan pencabutan izin yang terdokumentasi, pemerintah menggunakan alasan bahwa pemberitaan dapat menghasut masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban, merusak kewibawaan nasional, atau mengurangi kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional. Pemberitaan yang dinilai berlebihan dan memperkeruh suasana juga menjadi dasar penindakan.

Dari sudut pandang pemerintah, pemberitaan semacam itu dianggap berpotensi memperburuk situasi politik. Setelah kerusuhan menimbulkan korban dan kerugian, pengendalian arus informasi diposisikan sebagai bagian dari upaya pemulihan stabilitas.

Akan tetapi, persoalannya tidak berhenti pada alasan keamanan. Mengapa pemberitaan yang dianggap bermasalah harus dibalas dengan penghentian seluruh kegiatan penerbitan? Mengapa kesalahan jurnalistik, jika memang terbukti, tidak diselesaikan melalui mekanisme koreksi dan pertanggungjawaban yang proporsional?

Di sinilah pembredelan menjadi persoalan kebebasan pers. Negara tidak sekadar menindak informasi tertentu, tetapi juga menghentikan saluran yang digunakan masyarakat untuk mengetahui dan memperdebatkan kebijakan publik.

Penelitian sejarah mengenai *Indonesia Raya* menunjukkan bahwa surat kabar tersebut dikenal karena kritiknya terhadap pemerintah. Pencabutan izin terbit pada 22 Januari 1974 mengakhiri kiprah penerbitannya

Dari pembredelan ke pembungkaman yang lebih beragam

Malari memperlihatkan sebuah pola: ketika kritik politik dianggap mengancam stabilitas, pembatasan terhadap penyampaian kritik dapat ikut dibenarkan atas nama keamanan.

Pola tersebut perlu dibaca dengan hati-hati ketika membicarakan Indonesia sekarang. Demokrasi pasca-Reformasi memiliki perangkat hukum yang berbeda. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers dan menyatakan bahwa pers nasional tidak dikenai penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Undang-undang itu juga menempatkan pers sebagai sarana informasi sekaligus kontrol sosial.

Artinya, pembredelan seperti pada 1974 tidak bisa begitu saja disamakan dengan setiap persoalan pers pada masa kini. Namun, berakhirnya praktik pembredelan formal tidak otomatis menghilangkan tekanan terhadap kerja jurnalistik.

Catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang dipublikasikan pada Januari 2026 menunjukkan bahwa sepanjang 2025 terdapat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kasus-kasus tersebut mencakup kekerasan fisik, intimidasi, serangan digital, dan tekanan hukum. AJI juga mencatat 29 kasus serangan digital, termasuk serangan terhadap situs media dan pembekuan akun media sosial milik media. Organisasi itu menyoroti pula adanya intervensi terhadap ruang redaksi, tuntutan untuk menghapus berita, dan desakan agar media tidak memberitakan isu tertentu. Angka tersebut merupakan catatan kasus yang dihimpun AJI, bukan ukuran yang dengan sendirinya mewakili seluruh kejadian di Indonesia.



peliputan, serangan digital, gugatan hukum, atau intervensi terhadap keputusan redaksi.

Dampaknya tidak selalu berupa penutupan media. Dalam keadaan tertentu, tekanan dapat membuat wartawan mempertimbangkan kembali berita yang hendak diterbitkan, redaksi menahan laporan tertentu, atau media menghindari isu yang berisiko mendatangkan ancaman.

Persoalannya bukan hanya apakah sebuah berita akhirnya terbit atau tidak. Persoalannya juga apakah jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut, apakah redaksi dapat menentukan agenda pemberitaannya secara independen, dan apakah publik tetap memperoleh informasi yang penting untuk menilai kekuasaan.

Alasan yang berubah, pertanyaan yang tetap

Salah satu pelajaran dari Malari adalah pentingnya memeriksa alasan yang digunakan untuk membatasi kritik. Keamanan publik memang merupakan kepentingan yang sah. Kerusuhan, kekerasan, dan hasutan yang melanggar hukum tidak boleh diabaikan. Media pun tetap wajib mematuhi standar verifikasi, akurasi, dan etika jurnalistik.

Namun, tanggung jawab pers tidak berarti pers harus melindungi pemerintah dari kritik. Melaporkan ketidakpuasan masyarakat, mempertanyakan kebijakan ekonomi, dan mengungkap persoalan dalam pemerintahan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial.

Pemberitaan yang keliru dapat dikoreksi. Pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi. Dugaan pelanggaran dapat diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Cara-cara tersebut berbeda secara mendasar dari menghentikan penerbitan

perusahaan, dan kelompok berkepentingan tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang menentukan informasi apa yang boleh diketahui masyarakat.

Lima puluh dua tahun setelah Malari, pertanyaan tentang kemerdekaan pers tidak lagi cukup dijawab dengan memastikan bahwa tidak ada surat kabar yang dibredel. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah media sungguh-sungguh bebas memberitakan masalah yang tidak ingin didengar oleh mereka yang berkuasa.

Malari mengingatkan bahwa pembungkaman pers tidak selalu dimulai dengan pengakuan terbuka bahwa pemerintah ingin membatasi kritik. Ia dapat dimulai dari sebuah keadaan darurat, alasan menjaga stabilitas, atau tuduhan bahwa pemberitaan telah memperburuk situasi.

Karena itu, ukuran kebebasan pers bukanlah seberapa sering media memuji pemerintah atau seberapa tenang ruang publik terlihat. Ukurannya terletak pada seberapa jauh media dapat bekerja secara independen, menguji pernyataan pejabat, mengungkap persoalan publik, dan mempertanggungjawabkan pemberitaannya tanpa ancaman pembungkaman.

Malari bukan sekadar kisah tentang demonstrasi yang berakhir rusuh. Ia juga merupakan pengingat tentang apa yang terjadi ketika pemerintah memperoleh keleluasaan terlalu besar untuk menentukan batas kritik. Ketika pemberitaan dianggap sebagai ancaman sebelum diperiksa secara adil, masyarakat berisiko kehilangan bukan hanya kebebasan pers, melainkan juga hak untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di sekelilingnya.

#demonstrasi-unjuk-rasa #demokrasi

Bagikan Artikel Ini



Apri Damai Sagita Krissandi
Universitas Sanata Dharma

6 Pengikut

+ Ikuti Penulis



Malari 1974: Ketika Kerusuhan Menjadi Alasan Membungkam Pers

4 jam lalu



UMY dan UII Fasilitasi Mahasiswa Berdemo, Begini Seharusnya Sikap Kampus

1 hari lalu

Lihat Semua Artikel

Baca Juga



Gusti Imam Nugroho
Penulis Indonesiana

☆ Berita Pilihan

Agustus Kembali Membara



Penulis Indonesiana - Kamis, 27 Agustus 2026 19:10 WIB

Dari Pati ke Jakarta, suara rakyat kembali menggema. Di tengah keresahan, tuntutan

Boy Anugerah
Direktur Eksekutif Baturaja Project

Berita Pilihan

Dramaturgi Demonstrasi Mahasiswa Hari Ini



Direktur Eksekutif Baturaja Project - Jumat, 26 Juni 2026 18:21 WIB

Mahasiswa harus berani menarik satu simpul besar tuntutan untuk membenahi sengkarut sistemik yang terjadi....

0

Ayrra Zahwa
Penulis Indonesiana

Ketika Suara Rakyat Berhadapan dengan



Penulis Indonesiana - Kamis, 4 Juni 2026 22:18 WIB

Ketika suara rakyat menuntut perubahan, respons kekuasaan menjadi cermin kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap negara....

1

Artikel Terpopuler

News Uad
Penulis Indonesiana

Lima Akademisi UAD Diakui dalam Top 2% Scientist



Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Daftar Top 2% Scientist Worldwide adalah pemeringkatan berdasar indikator dampak penelitian yang dikembangkan tim peneliti Stanford University...

0

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Di tengah kabut asap yang pekat, seorang anak menanti hujan demi Nyai yang semakin sulit bernapas. ...



0

Ishak Wiraatmadja
Almnus IPB Angkatan 25 - Dosen Purnatugas

Hasrat Kekuasaan di Balik Kursi Wakil Menteri Pertanian

Almnus IPB Angkatan 25 - Dosen Purnatugas - 1 hari lalu

Dia masuk bukan sebagai penyeimbang teknokratis....



0

Wedhar Indeks Nusantara
Penulis Indonesiana

Menakar Strategi Ketahanan Pangan Desa Sinduagung

Penulis Indonesiana - 1 hari lalu

Upaya perlindungan petani ini diselaraskan dengan pembangunan infrastruktur antar-dusun (Kresek dan Keseneng) secara adil,...



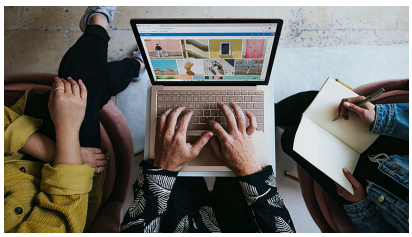
0

Hanif Pramono
Penulis Indonesiana

Promo Marketplace Tak Lagi Semurah Dulu

Penulis Indonesiana - 1 hari lalu

Marketplace membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas melalui berbagai kemudahan dan promosi. Namun, ketika biaya layanan bertambah ...



0

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Mahasiswa Prodi Magister Informatika Universitas Ahmad Dahlan (UAD) melaksanakan Prodamat pelatihan AI di SDN Karangsari...



0



Krispinus Iman Putra Ndruru

Penulis Indonesiana

Ketika Hukuman Berubah Menjadi Kekerasan dan Batas

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Kedisiplinan penting dalam pendidikan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Di mana batas kewenangan guru?...



0



Lusia Rahman Azzahra

Penulis Indonesiana

Kabut Asap Karhutla Kalimantan Ancaman

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Karhutla di Kalimantan memicu kabut asap yang mengancam kesehatan, keselamatan pengendara, lingkungan, dan negara tetangga. Perlu aksi nyata....



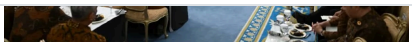
0



Ismail Suardi Wekke

Penduduk Kota Sorong

diharapkan pada peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo ...



0



Elnado Legowo
Penulis Indonesiana

Kota Misterius di Tengah Gurun Part 3

Penulis Indonesiana - 1 hari lalu

Di tengah gurun berdiri kota kuno dengan arsitektur yang mengerikan dan tak masuk akal. Bahkan patroli Ottoman menolak memasukinya....



0

Artikel Terbaru



BBC Tutup Beberapa Kanalnya, Apa Hikmah Yang Bisa Diambil TVRI

39 menit lalu



Tenang di Atas, Gelisah di Bawah

3 jam lalu



Nobel Sastra 2026 di Tengah Keringkihan Penulis Melawan

40 menit lalu



Kesalahan Sistem Peternakan: Inovasi Menutupi Akar

4 jam lalu



Mahasiswa Dampingi Guru Terapkan Pengelolaan Sampah

4 jam lalu

Lihat semua



Tengah Keringkihan Penulis Melawan

40 menit lalu



Malari 1974: Ketika Kerusuhan Menjadi Alasan Membungkam

4 jam lalu



Ucapan Tak Bisa Diulang: Etika Public Speaking di Balik

4 jam lalu



Dua Tahun Prabowo dan Negara yang Tak Menjelaskan Diri

5 jam lalu



Mitos Bintang 5: Mengapa Ulasan Pembeli Lain Begitu

1 hari lalu

Lihat semua

Terpopuler di Pilihan Editor



Nobel Sastra 2026 di Tengah Keringkihan Penulis Melawan

40 menit lalu



Siapa yang Pertama Kali Mengajarimu Takut pada PKI?

5 hari lalu



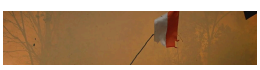
Malari 1974: Ketika Kerusuhan Menjadi Alasan Membungkam

4 jam lalu



Ucapan Tak Bisa Diulang: Etika Public Speaking di Balik

4 jam lalu



Pemerintah Sigap Ketika Tagih Pajak

